

STUDI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH JAMINAN KESEHATAN DAERAH SUMATERA BARAT SAKATO DALAM MENGHADAPI UNDANG-UNDANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL DAN UNDANG-UNDANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL TAHUN 2013

STUDY OF IMPLEMENTING THE LOCAL REGULATION OF COMMUNITY HEALTH INSURANCE SCHEME (JAMKESDA) WEST SUMATRA SAKATO TOWARDS SJSN AND BPJS LAW IN 2013

Tuty Ernawati

Balai Kesehatan Indera Masyarakat, Sumatera Barat

ABSTRACT

Background: Local health insurance (Jamkesda) is an effort made by the Government of West Sumatra province to improve the accessibility of health services for the poor or near poor who are not accommodated in the quota of public health insurance (Jamkesmas). Jamkesda was implemented at the start of 2007 until in 2011 using Governor Regulation West Sumatra Number 40 and Number 41 in 2007. After running for five years, there are still many problems in the implementation. Later in 2011, the provincial parliament of West Sumatra exercised its rights of initiative and enacted Local Legislation Number 10 year 2011 regarding the implementation of the Health Insurance West Sumatra Sakato. Afterwards, the implementation of Jamkesda West Sumatra Sakato refers to these regulations. The purpose of this study is to evaluate the implementation of the new regulation of the Jamkesda West Sumatra Sakato in 2013.

Methods : This study is a descriptive analysis with a qualitative using case study. Data collection is done at the Provincial Health Office / District Health Office / City selected, PT Health Insurance, regional planning agency (Bappeda), and health provider. Qualitative data were collected through in-depth interviews, and secondary data were collected through document review.

Result: The results of the study shows that implementation of health insurance on West Sumatra Sakato still had not been optimal, namely how the selection of the participants; a low premium that is Rp.6.000/month/member by sharing funding between provincial and district budgets / City budgets; the benefits are not yet comprehensive enough; health providers is still limited in the region of West Sumatra province and only in public facilities; health workers has not been evenly distributed; the team is still not functioning well; the monitoring and evaluation at every level Administrative as well as socialization of Jamkesda are not optimal; and the existing policy has not referred to higher level policy.

Conclusion: Implementation of Jamkesda West Sumatra Sakato does not go according to the existing policy. Among others, the selection of membership, quality of health care, low premiums, health facilities are limited, health workers have not been evenly distributed, and the monitoring and evaluation team has not been established as per the guidelines.

Suggestion: There is a need to evaluate Jamkesda West Sumatra Sakato policy so that the policies are not contradicting. There is a need to form a Monev Team for Jamkesda so that all parties have a sense of shared responsibility.

Keywords: Local Regulation of Jamkesda, health financing, Provider Jamkesda.

ABSTRAK

Latar Belakang : Jaminan kesehatan daerah merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah salah satunya Provinsi Sumatera Barat dimana tujuan dari program Jamkesda adalah untuk meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin atau mendekati miskin yang tidak tertampung dalam kuota jamkesmas yang diselenggarakan sejak tahun 2007, pelaksanaan jamkesda di mulai dari tahun 2007 s/d tahun 2011 diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat no 40 dan no 41 tahun 2007 dan setelah berjalan lima tahun, masih banyak ditemui kendala dalam pelaksanaannya, kemudian pada Tahun 2011 DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan hak inisiatifnya keluar peraturan Daerah nomor 10 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato sehingga sejak Tahun 2012 pelaksanaan jamkesda Sakato mengacu pada perda tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah tentang Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato Tahun 2013.

Metode: Penelitian ini merupakan penelitian analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus. Pengumpulan data di lakukan di Dinas Kesehatan Provinsi/Dinas Kesehatan Kab/Kota terpilih, PT Askes, Bappeda, PPK. Data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara mendalam, sedangkan data sekunder didapatkan melalui telaah dokumen yang terkait pelaksanaan Jamkesda.

Hasil penelitian : Pelaksanaan Jaminan kesehatan Sumatera Barat Sakato berdasarkan hasil kajian masih dirasakan belum optimal, yaitu cara pemilihan dan penetapan peserta. Premi yang rendah yaitu Rp.6.000/orang/bulan dengan sumber dana sharing antara APBD Provinsi dan APBD kabupaten/Kota, manfaat pelayanan kesehatan belum komprehensif. Pemberian Pelayanan Kesehatan masih terbatas di Wilayah Provinsi Sumatera Barat dan hanya di fasilitas pemerintah, Tenaga kesehatannya belum merata penyebaran, serta masih belum berfungsi Tim monitoring dan Evaluasi di Setiap tingkat Administratif. Sosialisasi tentang Jamkesda belum optimal, kebijakan yang ada masih belum sepenuhnya sesuai dengan kebijakan yang lebih tinggi.

Kesimpulan: Pelaksanaan Jamkesda Sumatera Barat Sakato belum berjalan sesuai kebijakan yang ada, antara lain penetapan kepesertaan, kualitas pelayanan kesehatan, premi yang rendah, fasilitas kesehatan terbatas, tenaga kesehatan belum